

TESIS
PRINSIP *LEX SPECIALIS* DAN *LEX GENERALIS* NORMA HUKUM
DALAM PENGATURAN DAN PENGURUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN
NEGARA



Oleh:

ANDIKA REFO HATIDAME

No. Mhs:225214660/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER
HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2024

THESIS

PRINCIPLES OF LEX SPECIALIS AND LEX GENERALIS LEGAL

NORMS IN THE REGULATION AND MANAGEMENT OF

GOVERNMENT AFFAIRS UNDER THE STATE MINISTRIES LAW



Oleh:

ANDIKA REFO HATIDAME

No. Mhs:225214660/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER

HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2024



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : ANDIKA REFO HATIDAME
Nomor Mahasiswa : 225214660/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : **PRINSIP *LEX SPECIALIS* DAN *LEX GENERALIS* NORMA
HUKUM DALAM PENGATURAN DAN PENGURUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG
KEMENTERIAN NEGARA**

Nama Pembimbing

Tanggal :

Tanda Tangan:

Dr. B. Hestu Cipto
Handoyo, SH., M.Hum.

22 Juni 2024

Dr. Hyronimus Rhiti
S.H., LL.M.

23 Juni 2024






UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : ANDIKA REFO HATIDAME
Nomor Mahasiswa : 225214660/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : **PRINSIP *LEX SPECIALIS* DAN *LEX GENERALIS* NORMA
HUKUM DALAM PENGATURAN DAN PENGURUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG
KEMENTERIAN NEGARA**

Telah Diuji dan Dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 28 Juni 2024

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum.	
2. Sekretaris	Dr. Hyronimus Rhiti S.H., LLM	
3. Anggota	Dr. H. Untung Setyardi, SH., M.Hum.	

Ketua Program Studi :


Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Mengetahui :


Fakultas Hukum

Prof. Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andika Refo Hatidame

No. Mahasiswa : 225214660 /PS/MIH

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul:

“PRINSIP *LEX SPECIALIS* DAN *LEX GENERALIS* NORMA HUKUM DALAM PENGATURAN DAN PENGURUSAN URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik Sebagian maupun seluruhnya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, 24 Juni 2024

Yang menyatakan:



Andika Refo Hatidame

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha esa atas berkat, rahmat dan kasih-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah Tesis ini yang berjudul “PRINSIP *LEX SPECIALIS* DAN *LEX GENERALIS* NORMA HUKUM DALAM PENGATURAN DAN PENGURUSAN URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA”. Penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari penulis dalam menyusun Tesis sehingga Tesis ini masih tergolong belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan, namun penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya.

Selama penulis menyusun dan menyelesaikan Tesis ini, ada begitu banyak pihak yang ikut serta memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof, Dr. Th. Anita Christiiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I untuk segal bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti S.H., LLM. selaku Dosen Pembimbing II untuk segal bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan tesis ini.

6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pengajaran dan pengetahuan selama ini.
7. Staf Bagian Tata Usaha dan Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dengan setia dan tanggungjawab memberikan pelayanan bagi penulis dan seluruh mahasiswa.
8. Keluarga penulis, almarhum Opa Frans Hatidame, Papa Hengki Hatidame, Mama Diana Supit, Adik Adisti Hatidame, Adik Andhini Hatidame serta keluarga besar Hatidame Supit, yang selalu mendukung, mendoakan, serta menjadi motivasi utama penulis selama studi.
9. Rekan-Rekan Pusat Bantuan Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Kepala Kantor Bapak Bibianus Hengky Widhi A., S.H., M.H., Sekertaris Ibu Nanda Indrawati S.H., M.H. , Staf Bapak Dwi Revan Yuniantara, serta teman-teman advokat magang, Pak Rudi, Ibu Maria, Andreas, Tania, Laras, Wynne, Viona yang sudah memberikan semangat dan serta tukar ide dalam penyelesaian penulisan ini.
10. Angelica, Via, Novy, Thin, Dary, Lita, Mia, Amalia, Prima, Nirmala, Aldy, Anggara dan sahabat-sahabat seperjuangan magister hukum angkatan 2022 atas dukungan dan kebersamaan selama ini.
11. Alva, Claudia, Diego, Enal, Juan, Angel, Andrew, Indra, Nio, Chenny, Juris, Vero, Carlos dan Acel teman-teman seperjuangan sewaktu sarjana yang telah memberikan dukungan dan semangat selama penulis menempuh pendidikan Magister.
12. Kak Mutiara, Kak Amelia, Kak Jelly, Indri, Glory, Silfia, Vantry dan semua rekan-rekan Pelayanan Komisi Remaja yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan semangat dan memotivasi penulis dalam pembuatan tesis.

13. Michelle Rumeser selaku kekasih penulis yang terus memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan tesis ini sampai tuntas.

14. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian tesis ini, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini bukan merupakan sebuah analisis ilmiah yang sempurna. Banyak hal yang masih kurang dan harus diperbaiki. Oleh karena itu, penulis membuka ruang bagi kritik dan saran dari para pembaca demi kemajuan tesis ini di masa mendatang. Kritik dan saran yang konstruktif menjadi senjata yang berguna untuk meluruskan pemahaman penulis. Akhir kata, selamat tercerahkan.

Sleman, 24 Juni 2024

Yang menyatakan:



Andika Refo Hatidame

Motto

“Believe in yourself and your dreams so that your prayers and hard work will become flowers of hope that never die”

~ Konan Naruto ~

“Setiap orang memiliki masa-nya, masing-masing tak perlu terburu-buru tunggulah kesempatan itu datang sendiri”

~ Gol D Roger~

Tesis Ini Di Persembahkan Untuk:

Papa, Mama, Adik-Adik, Alm Opa Dan Keluarga Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN TESIS.....	ii
PPENGESAHAN UJIAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Keasilan Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Prinsip <i>Lex Specialis</i> dan <i>Lex Generalis</i>	26
1. Pengertian Umum Prinsip <i>Lex Specialis</i> dan <i>Lex Generalis</i>	26
2. Konseptual Kesesuain Prinsip <i>Lex Specialis</i> dan <i>Lex Generalis</i>	28

B. Norma Hukum.....	29
1. Pengertian Norma Hukum.....	29
2. Perkembangan Konsep Norma Hukum.....	32
3. Norma Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	36
C. Tinjauan Regulasi Pengaturan Dan Pengurusan Urusan Pemerintahan.....	38
1. Pengertian Urusan Pemerintahan.....	38
2. Pengertian Urusan Pemerintahan Menurut Doktrin Para Ahli.....	39
3. Pengertian Urusan Pemerintahan Menurut Regulasi/Aturan.....	40
4. Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.....	40
D. Tinjauan Pengertian Kementerian/Menteri.....	42
E. Landasan Teori.....	42
1. Teori Negara Hukum.....	42
2. Teori Peraturan Perundang-Undangan.....	43
3. Teori Kepentingan.....	44
4. Teori Konflik.....	45
F. Batasan Konsep.....	48
1. Prinsip <i>Lex Specialis</i> Dan <i>Lex Generalis</i>	48
2. Norma Hukum.....	48
3. Urusan Pemerintahan.....	48
4. Kementerian Dan Menteri.....	48
5. Pengaturan Dan Pengurusan.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Jenis Data.....	52
D. Cara Pengumpulan Data.....	53
E. Metode Analisis Data.....	54
F. Penarikan Kesimpulan.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	56
A. Menentukan Konflik Norma Hukum <i>Lex Specialis</i> Dan <i>Lex Generalis</i> Sebagai Dasar Pengaturan Dan Pengurusan Urusan Pemerintahan Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.....	56
1. Analisis Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Daerah.....	61
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pemerintahan Di Daerah.....	62
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.....	64
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.....	65
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.....	64
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	67
2. Pelaksanaan Pengaturan Tentang Kementerian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.....	74
3. Analisis Sistem Pemerintahan Indonesia Pada Kementerian.....	79
a. Konsep Kewenangan Kementerian.....	86
b. Hubungan Kementerian Dengan Undang-Undang.....	95
4. Konsep Norma Validasi Pada Urusan Pemerintah.....	98

B. Penyelesaian Konflik Norma Hukum Terkait Pengaturan Dan Pengurusan Urusan Pemerintahan Dalam Perspektif Norma Hukum <i>Lex Specialis</i> Dan <i>Generalis</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.....	102
1. Substansi Dalam Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.....	102
2. Sistem Hukum Positif Indonesia <i>Ius Constituendum</i> Dalam Ketentuan Urusan Pemerintahan.....	119
BAB V PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel Ilustrasi Perbedaan Norma. Dipakai Menjadi Acuan Perbedaan Letak Lex
Specialis Dan Lex Generalis10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Gambar 1 Bagan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	70
Gambar 2 : Gambar 2 Bagan Posisi Kementerian Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia...	85
Gambar 3 : Gambar 3 Dim (Daftar Inventaris Masalah) Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Negara.....	115
Gambar 4 : Gambar 4 Dim (Daftar Inventaris Masalah) Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.....	117

ABSTRAK

Penelitian ini melihat konflik norma antara prinsip-prinsip *lex specialis* dan *lex generalis* dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang merugikan, penundaan dalam proses penyelesaian, dan potensi ketidakadilan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji, menemukan dan menganalisis penyelesaian konflik penggunaan prinsip *lex specialis* dan *lex generalis* dalam perspektif norma hukum urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan yang mengumpulkan data, melakukan analisis kualitatif, dan menggunakan penalaran deduktif untuk kesimpulan, dengan pendekatan konseptual prinsip norma hukum *lex specialis* dan *lex generalis* dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menetapkan ruang lingkup dan batasan kewenangan masing-masing kementerian dengan lebih jelas, sehingga meminimalisir konflik kewenangan antar kementerian dan memastikan bahwa setiap kementerian menjalankan tugas sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang. Jika substansi pada Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada pasal 4 dan 5 yang menyebutkan jenis-jenis urusan pemerintahan harusnya diperhatikan lagi penjabaran norma sebagai pengurusan dan pengaturan kewenangannya yang terkandung pada asas tujuan jelas dan asas organ yang tepat agar undang-undang rezim bersifat politik ini terarah atau pun usulan modifikasi setiap menteri dengan perintahnya dengan satu urusannya yang dirangkai agar setiap menteri tidak *overlapping* pada aturan yang sama dalam bentuk tugasnya sama agar tugasnya jelas sebagai *ius constituendum* kedepannya.

Kata Kunci: Konflik Norma, *Lex Specialis* dan *Lex Generalis*, Pelaksanaan Kewenangan, Klaster Urusan Pemerintahan, Substansi.

ABSTRACT

This research sees that the conflict of norms between the principles of *lex specialis* and *lex generalis* can result in adverse legal uncertainty, delays in the settlement process, and potential injustice to individuals or entities involved in regulating and managing government affairs according to Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State. The purpose of the research is to review, find and analyze the conflict resolution of the use of the principles of *lex specialis* and *lex generalis* in the perspective of legal norms of government affairs according to Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State. The research method used is normative juridical research which refers to library research that collects data, conducts qualitative analysis, and uses deductive reasoning for conclusions, with a conceptual approach to the principles of *lex specialis* and *lex generalis* legal norms and legislative approaches. The data source used is secondary data with primary legal materials and secondary legal materials obtained through literature study. The results of research on Law Number 39 of 2008 establish the scope and limits of authority of each ministry more clearly, thus minimizing conflicts of authority between ministries and ensuring that each ministry carries out its duties in accordance with the mandate given by law. If the substance of Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State, the phrases of articles 4 and 5 which mention the types of government affairs should be considered again the elaboration of norms as management and regulation of authority contained in the principle of clear objectives and the principle of appropriate organs so that this political regime law is directed or the proposed modification of each minister with his *printah* with one business that is elaborated so that each minister does not overlap on the same rules in the form of the same task so that his duties are clear as *ius constituendum* in the future.

Keywords: Conflict of Norms, *Lex Specialis* and *Lex Generalis*, Exercise of Authority, Cluster of Government Affairs, Substance.